

## Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang

Septiana Putri Pangestu<sup>1</sup>, Ayu Alfina Wijiyanti<sup>2</sup>, Muhammad Muhaiminul Azizul K<sup>3</sup>,  
Elvira Ayu Lestari<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

[septiana.putri.pangestu@students.untidar.ac.id](mailto:septiana.putri.pangestu@students.untidar.ac.id), [ayu.alfina@students.untidar.ac.id](mailto:ayu.alfina@students.untidar.ac.id),  
[muhammad.muhammad.azizul.khakim@students.untidar.ac.id](mailto:muhammad.muhammad.azizul.khakim@students.untidar.ac.id), [elvira.ayu.lestari@students.untidar.ac.id](mailto:elvira.ayu.lestari@students.untidar.ac.id)

**Abstract.** *Appropriate financial management is key in managing regional finances that are vulnerable to risk. Even though financial risk exists, this does not always indicate a violation. Good financial management in the regions is the key to demonstrating the effectiveness and efficiency of the use of public funds. This study uses a qualitative approach with primary data sources through interviews and direct observation in the field. The research results show that the South Magelang District OPD has implemented accounting procedures in accordance with regulations, achieving a full level of accountability with optimal transparency in administration and financial accountability. However, continued efforts are needed in financial management, supervision and reporting to maintain public trust and increase the effectiveness of financial management in the future.*

**Keywords :** *Accountability, Transparaency, and Financial Management*

**Abstrak.** Pengelolaan keuangan yang tepat merupakan kunci dalam mengelola keuangan daerah yang rentan terhadap risiko, meskipun risiko keuangan ada, hal ini tidak selalu menunjukkan adanya pelanggaran. Pengelolaan keuangan yang baik di daerah menjadi kunci dalam menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPD Kecamatan Magelang Selatan telah mengimplementasikan prosedur akuntansi yang sesuai dengan regulasi, mencapai tingkat akuntabilitas penuh dengan transparansi yang optimal dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan. Meskipun demikian, diperlukan upaya berkelanjutan dalam manajemen, pengawasan, dan pelaporan keuangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di masa depan.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas, Transparansi dan Pengelolaan Keuangan

### LATAR BELAKANG

Keuangan suatu daerah menjadi tanggung jawab dari daerah itu sendiri. Pengelolaan keuangan daerah menjadi tanda bahwa daerah tersebut telah melakukan suatu kegiatan dengan penggunaan keuangan yang baik. Semua daerah pastinya harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik, tidak terkecuali pada daerah tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan yang menaungi beberapa desa atau kelurahan tentunya memiliki dana yang besar. Dana tersebut berasal dari pemerintah pusat. Pemberian dana dari pemerintah pusat harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Keuangan harus dikelola dengan penggunaan yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran harus sesuai dengan anggaran prioritas bagi pemerintah guna menangani masalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Pengelolaan keuangan tentunya juga harus dibarengi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri dapat diartikan sebagian pertanggungjawaban Akbar (2012). Secara harfiah akuntabilitas yaitu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan yang telah ditentukan sebelumnya melalui media

pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik (Ismiarti,2013)” (Dito Aditia Darma Nasution, 2018).

Pengelolaan keuangan tentunya harus dilakukan secara benar. Hal tersebut karena keuangan pada suatu daerah dapat dikatakan sebagai hal yang riskan. Artinya terdapat banyak risiko dalam keuangan. Risiko tersebut bukan berarti terdapat pelanggaran, hanya saja pengelolaan keuangan yang baik dapat mencegah pelanggaran. Kecamatan Magelang Selatan, tempat diadakannya survei telah melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Semua pengelola keuangan telah dilakukan dengan menggunakan digitalisasi atau teknologi. Hal tersebut berarti sumber daya yang dimiliki juga telah berkualitas. Akuntabilitas dalam suatu organisasi sektor publik juga menjadi sebuah tolak ukur kinerja. Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka kinerja pegawai juga dapat dikatakan baik.

Kecamatan Magelang Selatan yang terletak di kota Magelang telah memiliki pelayanan yang baik. Pelayanan dan pengelolaan keuangan yang baik menjadi bukti bahwa organisasi sektor publik di Magelang Selatan telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya program kerja yang telah dilakukan. Program kerja yang telah sesuai dengan program prioritas seperti penanganan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu juga pengelolaan keuangan dengan akuntabilitas juga telah dilakukan dengan baik, seperti adanya laporan keuangan yang baik dan laporan keuangan tersebut dapat dilihat oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat membuktikan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan telah dengan baik. Keterbukaan yang ada juga dapat membuktikan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan baik, karena dengan keterbukaan masyarakat dapat mengetahui keuangan organisasi sektor publik digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan keuangan juga dapat diketahui dengan adanya penggunaan dana darurat ketika terjadinya pandemi *covid-19*.

Pengelolaan keuangan haruslah dilakukan dengan baik serta harus mengikuti peraturan yang berlaku. Hal tersebut karena pengelolaan keuangan nantinya digunakan sebagai penilaian penggunaan dana dari pemerintah pusat di bagian laporannya. Pengelolaan keuangan juga dapat membuat dana yang ada dapat dikelola dengan baik dan dapat tepat sasaran dalam penggunaan. Setiap daerah tentunya memiliki tujuan, sasaran, visi dan juga misi. Hal tersebut tentunya memerlukan dana untuk mencapai semua itu. Penggunaan dana dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat membuat semua hal yang diinginkan dapat tercapai. Ketercapaian tersebut dapat menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan baik. Ketercapaian yang ada tentunya harus dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat, karena semua dana dari pusat yang dikelola oleh daerah semuanya harus tertuju untuk masyarakat

demikian kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan Kecamatan Magelang Selatan yang mengelola keuangannya dengan baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Semua pengelolaan keuangan secara terbuka akan dilaporkan dan laporan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah telah menggunakan dana yang pemerintah pusat berikan. Setiap daerah perlu adanya pengelolaan keuangan agar semua yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan keuangan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk ditelusuri. Pendalaman, tata cara, serta keterkaitan dengan transparansi menjadi sesuatu hal perlu digali lagi. Akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dapat menjadi satu kesatuan. Akuntabilitas menjadi bukti tanggung jawab dari pengelolaan keuangan. Hal tersebut tentunya menjadikan akuntabilitas perlu ada dalam setiap organisasi sektor publik sebagai bentuk dari pertanggungjawaban keuangan yang telah ada. Hal tersebut juga menjadikan masyarakat dapat mengetahui keuangan daerah yang ada telah digunakan dengan baik atau tidak dengan adanya akuntabilitas dan pengelolaan keuangan tersebut.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sama pentingnya dengan pengelolaan keuangan itu sendiri. Akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik akan menimbulkan rasa percaya dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan memahami permasalahan, kesulitan, maupun hal lain yang melibatkan pengelolaan keuangan. Hal tersebut karena dengan akuntabilitas yang baik dapat menjadi bukti bahwa pemerintah telah melayani masyarakat dengan baik. Kecamatan Magelang Selatan sendiri juga telah melakukan akuntabilitasnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pembuatan laporan keuangan yang dapat dilihat oleh masyarakat. Akuntabilitas yang ditetapkan dengan baik akan memberikan gambaran nyata bagi masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik, sehingga masyarakat juga dapat lebih mempercayai pemerintah dalam bekerja. Hal itulah yang juga dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Magelang Selatan yang menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi sektor publik yang dilakukannya. Hal tersebut pula yang menarik minat kami untuk melakukan penelitian dengan wawancara secara langsung dengan pihak pemerintah Kecamatan Magelang Selatan mengenai kinerja, dan pengelolaan keuangan yang dilakukan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas secara harfiah disebut dengan *accountability* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2019),

akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Menurut Natasya et al., (2022) akuntabilitas berkaitan erat dengan kegiatan kontrol khususnya mengenai pencapaian hasil dalam pelayanan publik dan penyapaian yang transparan kepada masyarakat. Pengendalian (control) tidak akan berfungsi dengan baik apabila tidak didukung oleh mekanisme akuntabilitas yang tepat.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyatakan bahwa akuntabilitas adalah asas yang mengatur bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas dilaksanakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat memaksimalkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan baik oleh individu, organisasi dan manager kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta informasi berkaitan dengan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administratif yang mencakup tentang keberhasilan dan kegagalannya dalam pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) sampai dengan pasal 38 ayat (2), meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

## **2. Transparansi**

Transparansi didasarkan pada kebebasan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan yang disediakan secara memadai dan dijadikan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi. Transparansi akan menciptakan *feedback* yang baik anatar pemerintah dan masyarakat karena adanya keterbukaan informasi menjadi hal penting bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan. Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut (Mardiasmo, 2019). Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses selengkap-lengkapny mengenai keuangan. Transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, antara lain berkaitan dengan informasi tentang kebijakan, proses perumusan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut (Septiawati et al., 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Nasional menyatakan bahwa transparansi adalah asas keterbukaan dan integritas, serta secara terbuka dan menyeluruh kepada publik tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam dua hal yaitu ; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengurangi peluang terjadinya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Adanya keterbukaan, partisipasi dan kemudahan akses bagi semua masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah dapat menciptakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **3. Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan adalah semua kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) secara harfiah berasal dari kata manajemen yang berarti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber penkeuangan, menggunakan keuangan sebaik mungkin hingga mengalokasikan keuangan pada sumber-sumber investasi. Aktivitas pengelolaan keuangan organisasi yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan keuangan secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang diawali dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Menurut Susanti et al., (2023) pengelolaan yaitu segala aktivitas yang dilaksanakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dengan dana yang di alokasikan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang di terima. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan

prinsip tata kelola yaitu akuntabilitas, transparan dan partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **METODOLOGI**

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan kegiatan wawancara serta melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu di Kecamatan Magelang Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan prosedur akuntansi yang berlaku di OPD juga diterapkan di kecamatan. Pelaksanaan fungsi akuntansi ini dilaksanakan oleh PPK OPD. Pada OPD Kecamatan, tugas sebagai PPK OPD ini biasanya dirangkap oleh Sekretaris Camat atau Kepala Subbagian Keuangan tergantung kebijakan daerah masing-masing. Fungsi akuntansi yang dijalankan oleh PPK OPD ini nantinya yang memberi *output* berupa Laporan Keuangan (Kemenkeu, 2017). Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, setidaknya ada 5 indikator suksesnya pengelolaan keuangan desa, yang terdiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk mengukur tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Akuntansi, 2018).

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pejabat terhadap masyarakat yang telah memberi mandat untuk mengurus kepentingan masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan baik di pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan (Studi et al., 2022). Sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD Kecamatan Magelang Selatan digambarkan dalam 4 indikator penting, yaitu kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan.

### **a. Kegiatan atau Perencanaan**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang ada pada OPD Kecamatan Magelang Selatan ini disusun oleh sekretaris kecamatan dan disampaikan oleh camat kepada kepala BAPPEDA paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan

dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD (Magelang Selatan, 2024).

b. Pelaksanaan Kegiatan

Proses penganggaran pemda kabupaten/kota telah mengalokasikan anggaran kegiatan pembangunan sarpras kecamatan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan nantinya Renja yang telah disusun sebelumnya akan dicatat pada masing-masing RKA. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya pada OPD Kecamatan Magelang Selatan dapat diketahui bahwa seluruh OPD di Kota Magelang wajib memberikan informasi publik dimana terdiri atas wajib diumumkan secara berkala, wajib diumumkan serta merta, dan wajib diumumkan setiap saat.

Selain itu terdapat daftar informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang tidak dapat diakses oleh semua pihak atau informasi dengan akses terbatas. Hasil dokumentasi dan observasi di OPD Kecamatan Magelang Selatan ini telah memasang baliho atau informasi tentang APBD di depan kantor. Selain itu juga mencantumkan beberapa program atau kegiatan OPD Kecamatan Magelang Selatan yang sedang berjalan atau sudah terlaksana. Pemasangan baliho ini berguna agar masyarakat dapat melihat rincian dana yang dikelola oleh pemerintah daerah.

c. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Tingkat persentase transparansi dan akuntabilitas pada penatausahaan dan pertanggungjawab di OPD Kecamatan Magelang Selatan ini telah menunjukkan taraf 100%, artinya OPD Kecamatan Magelang Selatan dapat melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terkait akuntabilitas, pelaksanaan pengelolaan keuangan pada OPD Kecamatan Magelang Selatan telah memenuhi *accountability theory*. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya implementasi yang menunjukkan semua dana yang dikeluarkan oleh OPD dapat dipertanggungjawabkan secara fisik.

Adanya prinsip akuntabilitas akan menjadi alat ukur kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan nantinya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat guna mendukung program atau kegiatan yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Magelang Selatan. Dari hasil wawancara dan observasi dapat memberi kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan pada OPD Kecamatan Magelang Selatan sudah transparan dan akuntabel, walaupun masih perlu peningkatan. Dengan demikian

diperlukan penyesuaian situasi dan kondisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pembinaan dan Pengawasan

Agar terciptanya pengelolaan keuangan pada OPD yang optimal, diperlukan pengawasan dan pembinaan terhadap program/kegiatan yang dilakukan oleh bupati/walikota dan dapat dilakukan pengawasan oleh Inspektorat kabupaten/kota. Berdasarkan hasil wawancara pada OPD Kecamatan Magelang Selatan telah melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diawasi oleh walikota yang mana dibantu oleh inspektorat.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Magelang Selatan telah sesuai dengan peraturan dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada OPD Kecamatan Magelang Selatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 130 Tahun 2018

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di OPD Kecamatan Magelang Selatan telah mengikuti prosedur akuntansi yang berlaku dengan baik, mencapai tingkat akuntabilitas 100% dengan transparansi yang optimal dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban. Keberhasilan ini tercermin dari implementasi yang konsisten terhadap standar akuntabilitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas, tetap diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan dalam manajemen, pengawasan, dan pelaporan keuangan di masa mendatang. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akuntansi, J. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 30–41. <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/6595/5938>
- Darma, D. A. (2018). ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2.

- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEIYAI. *Journal Of Business And Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Kemenkeu, D. P. (2017). *Keuangan-Kecamatan.pdf* (pp. 1–11). <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Keuangan-Kecamatan.pdf>
- Magelang Selatan, K. (2024). *Kecamatan Magelang Selatan*. Kecamatan Magelang Selatan. <https://selatan.magelangkota.go.id/>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Natasya, N. A., Desmiyatiwati, & Anggraini, L. (2022). ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOAAN ALOKASI DANA DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR. *Jurnal Al-Iqtishad*, 2, 97–113.
- Septiawati, Hizazi, A., & Mansur, F. (2021). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS PADA APARAT DESA DI KECAMATAN TABIR BARAT KABUPATEN MERANGIN). *Jambi Accounting Review*, 2(April), 14–29.
- Studi, P., Akuntansi, M., Ratulangi, U. S., & Bahu, U. (2022). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 13 (1), 2022. 13(1), 101–112.
- Susanti, M., Afni, N. A., & Rayyan, F. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) ( Studi Desa Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue ). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1, 120–131. <https://doi.org/10.29103/jam.v>